

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUMBAWA

Ardiyansah¹, Fikri Muchsen Badib^{2*}, Muslim

^{1,2,3}Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: fikribadib13@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: November 2023</i> <i>Revised: Desember 2023</i> <i>Published: 30 Desember 2023</i>	
Keywords <i>Implementasi;</i> <i>Persampahan;</i> <i>Peraturan Daerah;</i>	Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik di daerahdaerah di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan penduduk secara cepat Kabupaten Sumbawa juga menghadapi persoalan yang sama, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa pada studi kasus kegiatan penanganan sampah di Kecamatan Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain wawancara, dokumentasi dan observasi, serta sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari informant, dokumen dan peristiwa. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 pada studi kasus kegiatan penanganan sampah belum cukup baik, hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa terkait sumber daya manusia yang dimiliki masih belum kompeten dikarenakan personil yang dimiliki dalam menangani pengelolaan sampah masih ada yang belum sesuai dengan bidangnya, maka upaya yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam menangani hambatan yang ada yaitu dengan cara pemaksimalan komunikasi serta pengadaan TPS3R dan penerapan prosedur 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)secara maksimal.

PENDAHULUAN

Ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia.Maka dari itu pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Herlina,2017).

Permasalahan tentang lingkungan ini semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Pada mulanya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan kejadian-kejadian yang terjadi sebagai bagian dari proses alam. Proses ini terjadi tanpa menimbulkan dampak yang cukup besar bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat membaik secara alami

(homeostasis). Akan tetapi, saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, adapun karena faktor utama dari rusaknya lingkungan adalah dari tindakan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dari berbagai faktor terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal fikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaan dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia yang dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. (Suhairiah, 2021).

Pencemaran lingkungan tidak bisa dipungkiri semakin hari semakin meningkat yang disebabkan oleh berbagai hal, Seperti bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola akan manfaat sampah karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang, Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak negatif bagi masyarakat. (Sari, 2016)

Adanya sampah merupakan dampak yang selalu menjadi persoalan di dalam masyarakat, sampah juga cenderung selalu disangkut pautkan kepada faktor kenyamanan, kesehatan, estetika maupun keindahan serta kebersihan lingkungan. Adapun tumpukan sampah yang dapat menyebabkan rusaknya suatu keindahan dan kenyamanan untuk masyarakat umum dalam hal ini dapat dikatakan sebagai degradasi lingkungan yang bersifat sosial. (Suharwati, S. I, & Rahman, A.M, 2018)

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan bahwa sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat sehingga Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya dalam rangka meningkatkan efesiensi dan pengurangan sampah semaksimal mungkin sebagai upaya penerapan dalam melakukan pengelolaan sampah. (Prabowo, 2018)

Menimbang dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyikapi penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan dua hal yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Terkait penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi berbagai kegiatan diantaranya pemilahan sampah dalam

bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah atau zat sifat sampah serta pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah atau tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Tetapi nyatanya fakta yang berada di lapangan atau gejala memperlihatkan jauh berbeda, contohnya dalam hal pemilahan sampah masih banyak ditemukan sampah yang tercampur begitu saja yang menyebabkan banyak masalah bagi lingkungan sekitar padahal sedikitnya ada lima jenis sampah yang harus dibedakan yang terdiri dari sampah yang mengandung bahan berbahaya, mudah terurai, dapat digunakan kembali, dapat di daur ulang atau sampah lainnya, dan tidak hanya itu permasalahan juga terlihat dalam proses pengangkutan sampah yang sering mengalami penumpukan serta proses pengangkutan yang tidak dengan semestinya.

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik meneliti dan membahas lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, pada studi kasus kegiatan penanganan Sampah di Kecamatan Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat dan didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, dimana penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahas, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. David Williams (1999). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, tempat fasilitas umum serta pemukiman penduduk. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan ; Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 32 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Staf pelaksana dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi serta data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai

sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan keabsahan data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai suatu tujuan guna untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Dari penjelasan diatas sama halnya dengan yang tertuang pada awalan pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukannya upaya pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya sampah. Kemudian dalam pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan ungkapan dari dari Bapak Abdul Malik, A.Md, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah ini memang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di lingkup keseluruhan Kabupaten Sumbawa agar dapat tertangani dengan baik. Setelah merancang peraturan daerah yang ditunjukkan untuk menertibkan pengelolaan sampah, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan, dalam sebuah kebijakan publik implementasi ini sangatlah penting, jika tidak terealisasi dengan baik maka sia-sia sebuah kebijakan publik. Dalam pengelolaan sampah khususnya kegiatan penanganan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa melalui apa yang sudah diatur dalam pasal 11 pada peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 dapat di dijelaskan melalui beberapa indikator yaitu pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah, pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS, pengangkutan sampah dalam bentuk membawa dari TPS ke TPA, pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan terakhir pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan residu hasil sampah ke media lingkungan.

Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah Pemilahan sampah sangatlah penting dalam kegiatan penanganan sampah yang berupa pengelompokkan sampah dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah maupun sifat sampah yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa telah berupaya mensosialisasikan betapa pentingnya dalam pemilahan sampah, mengingat sampah merupakan permasalahan yang sudah klasik khususnya di Kabupaten Sumbawa. namun itu senua perlu ada kajian kebalik untuk mengetahui sampai mana himbauan itu berjalan. Terlebih pada umunya paradigma masyarakat terhadap sampah masih minim.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokkan sesuai dengan jenis, jumlah atau sifat sampah belum maksimal terlaksana dibuktikan dengan pengakuan warga yang masih mengalami kesulitan dalam

melakukan pemilahan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan masalah perekonomian padahal sangat jelas untuk kegiatan pemilahan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 tahun 2016 salah satunya mengatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah secara aman dan pemerintah daerah juga diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS Pada proses ini, pengumpulan sampah mulai dari proses pengambilan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara sebagaimana dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 tahun 2016 yang meliputi bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan kemudian pemerintah daerah juga diwajibkan menyediakan TPS atau TPS3R, pengelola kawasan pemukiman serta pemerintah juga diwajibkan melakukan pembinaan, pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah. Berdasarkan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum maksimalnya proses pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara yang disebabkan adanya beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan pembuangan sampah secara ilegal oleh masyarakat.

Dalam pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pengelolaan sampah dan membutuhkan penanganan yang cukup teliti dengan pengoptimalan pengangkutan yang harus maksimal. proses penanganan berupa pengangkutan yang dilakukan oleh pihak dinas lingkungan hidup kabupaten Sumbawa telah berusaha mengupayakan melakukan penerapan yang cukup singkat, prosedur pengelolaan sampah juga dilakukan dengan beberapa tahapan saja agar mudah dilakukan oleh masyarakat maupun pelaksana kebijakan, namun berdasarkan temuan lapangan oleh peneliti tentang pengangkutan sampah dengan truck yang menyebutkan selalu menggunakan penutup truck agar tidak mengakibatkan gangguan bagi masyarakat maupun pengguna jalan keadaan nyatanya masih terlihat tidak menggunakan sama sekali.

Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah merupakan peran wajib bagi pemerintah yang mana didalamnya berupa kegiatan pemadatan, pengomposan, pendauran ulang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa selaku pelaksana telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai cara dalam pengolahan sampah sesuai dengan apa yang telah di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa namun tidak bisa dipungkiri dalam pengolahan sampah masih ditemukan adanya kendala seperti jumlah sampah yang terlalu banyak.

Pada pemrosesan akhir sampah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, kegiatan

pemrosesan ini dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan.

Berdasarkan wawancara diatas serta pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam pemrosesan akhir sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa telah berupaya melakukannya dengan 3 metode antara lain lahan urug terkendali, lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan, dalam 3 metode tersebut diketahui satu diantaranya belum bisa dilakukan secara maksimal yaitu pemrosesan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan kedepannya pihak Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sumbawa Akan berupaya secara maksimal dalam menangani hambatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima indikator tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah masih belum maksimal terlaksana hal tersebut dibuktikan dengan munculnya berbagai sebab seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.

Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa

Pada implementasi peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah pada indikator komunikasi berkaitan dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dan memberikan informasi tentang sanksi yang diberikan ketika masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Adanya sosialisasi yang diberikan baik kepada pegawai maupun masyarakat dalam peneltian ini dimaksud bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa harus memberikan berupa arahan terkait pentingnya menjaga lingkungan dan dampak dari membuang sampah. sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa sudah melakukan beberapa cara untuk melakukan sosialisasi baik dengan pegawai maupun dengan masyarakat tentang permasalahan sampah baik secara langsung maupun tidak langsung agar kedepannya segala pihak bisa lebih peduli dengan permasalahan sampah. Maka dari itu berdasarakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa peneliti melihat terkait dengan sub indikator adanya sosialisasi ini peneliti menilai sosalisasi yang diberikan belum maksimal, soosialisasi ini harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran khususnya masyarakat akan pentingnya lingkungan dan tidak membuang sampah secara sembarangan.

Pada indikator komunikasi salah satunya yang ada yaitu masyarakat tahu akan sanksi, dalam hal ini masih berkaitan dengan sosialisasi yang dijelaskan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa juga memberikan informasi terkait sanksi yang ada untuk masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, sanksi tersebut telah tertuang pada peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat cukup mengetahui akan sanksi berupa denda dan kurungan penjara dan masyarakat dituntut untuk

mengikuti peraturan yang ada maka dalam hal ini diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dapat membuat patuh akan peraturan yang ada namun hingga kini masih ada masyarakat yang masih tidak peduli.

Aspek selanjutnya ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dinilai kurang maksimal, sehingga berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah belum maksimal karena untuk menangani sampah haruslah ditangani oleh orang-orang yang berkompeten yang banyak mengerti mengenai dampak sampah bagi lingkungan.

Aspek terakhir fasilitas yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Sumbawa memang sudah ada namun masih minim, sehingga pengoperasiannya pun belum maksimal dalam menangani sampah dilihat juga dari pengakuan masyarakat bahwa alat pengangkut sampah hanya melayani masyarakat yang dekat dengan jalan raya saja tanpa memikirkan bagaimana wilayah yang jauh dengan jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa untuk mengatasi hal tersebut adalah; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa juga menjelaskan terobosan yang akan dilakukan dalam mengurangi produksi sampah di Kecamatan Sumbawa selain dari pemanfaatan TPS3R yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) karena berdasarkan fakta di lapangan bahwa sampah yang berasal dari masyarakat itu kebanyakan berasal dari sampah-sampah yang berbahan plastik. Selain dibutuhkan peran serta dari masyarakat kehadiran TPS3R dan terobosan mengenai pengurangan sampah plastik dengan prosedur prosedur 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) akan membantu masyarakat untuk bisa mengolah sampah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali serta meminimalisir produksi sampah yang semakin meningkat tersebut sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti bahwa sampah yang berada di Kecamatan Sumbawa mencapai 11.343 ton/tahun dengan adanya TPS3R ini timbunan sampah tersebut dapat berguna dan begitu juga sampah yang akan masuk ke tempat pembuangan akhir juga akan berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan lapangan, maka peneliti menyimpulkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang pengelolaan sampah pada studi kegiatan penanganan sampah di Kecamatan Sumbawa sebagai berikut : 1. Terkait bagaimana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang pengelolaan sampah dapat disimpulkan masih belum cukup baik terlaksana hal tersebut dibuktikan dengan munculnya berbagai sebab seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa dalam peroses penanganan sampah. 2. Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah ditemukan beberapa temuanhal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa yang mengakibatkan kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah, kemudian terhadap sanksi yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya 83 berjalan dengan baik serta dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa terkait sumber daya manusia yang dimiliki masih belum kompeten dikarenakan personil yang dimiliki dalam menangani pengelolaan sampah masih ada yang belum sesuai dengan bidangnya 3. Upaya yang akan dilakukan dalam optimalisasiImplementasi Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampahpihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa memiliki terobosan dalam menutupi kekurangan serta hambatan yaitu dengan cara pemaksimalan serta pengadaan TPS3R dan penerapan prosedur 3R (Reduce, Reuse, dan Recyle) secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasiah, A Chaedar. (2006). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Denzin., Eds Michele D. Giardina, Walnut Creek. (2006). *Penyelidikan Kualitatif dibawah rezim konservatif*. CA: Lift Coast Press
- Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.